

EKSISTENSI ISBAT NIKAH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN

Anas Mustangin (124124037)
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum
Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Abstrak

Penelitian ini membahas eksistensi isbat nikah terhadap pencatatan perkawinan, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan tidak tercatat. Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengesahan status perkawinan melalui putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalisasi administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat restoratif. Dengan adanya putusan isbat, perempuan memperoleh kepastian hukum atas statusnya sebagai istri serta akses terhadap hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, hak atas harta bersama, pengasuhan anak, hingga akses terhadap layanan administrasi negara. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan pentingnya isbat nikah sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak dalam perkawinan tidak tercatat. Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen, putusan isbat yang sah menjadikan perkawinan diakui secara hukum, memberikan perempuan legitimasi administratif, sosial, dan ekonomi yang setara dalam struktur hukum negara. Dengan demikian, isbat nikah memiliki posisi strategis dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Perlindungan Hukum, Pencatatan Perkawinan, Kepastian Hukum, Hans Kelsen.

THE EXISTENCE OF ISBAT MARRIAGE REGULATION WITH REGARD TO MARRIAGE REGISTRATION

Anas Mustangin (124124037)
Faculty of Law/Master of Law
Dr. Hwian Christiano, S.H., M.H.

Abstract

This study examines the role of marriage confirmation (isbat nikah) in marriage registration, particularly in the context of legal protection for women engaged in unregistered marriages. Isbat nikah is a legal mechanism that allows for the validation of marital status through a religious court decision. The results show that isbat nikah serves not only as a form of administrative legalization but also as a means of restorative legal protection. With an isbat nikah decision, women gain legal certainty regarding their status as wives and access to civil rights such as maintenance, inheritance, rights to joint property, child custody, and access to state administrative services. The Supreme Court, through Circular Letter Number 3 of 2018, emphasized the importance of isbat nikah as an instrument of justice and legal protection, especially for women and children in unregistered marriages. From the perspective of Hans Kelsen's legal theory, a valid isbat nikah decision legally recognizes a marriage, granting women equal administrative, social, and economic legitimacy within the state's legal structure. Thus, isbat nikah plays a strategic role in ensuring justice and legal certainty within the national legal system.

Keywords: Marriage Confirmation, Legal Protection, Marriage Registration, Legal Certainty, Hans Kelsen.